



INFO KELAUTAN DAN PERIKANAN



PARTISIPASI: Kelompok masyarakat pengawas atau pokmaswas mengadakan kegiatan implementasi di Kampung Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Keberadaan Pokmaswas dibutuhkan bersinergi dengan pemerintah.

Pembinaan Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas

Ikut Awasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan membuat ekosistem populasi ikan lokal di DIY terancam punah. Menyikapi itu, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tidak mau tinggal diam. Dinas kemudian bergerak dengan mengadakan pembinaan teknis bagi calon kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) agar ikut menjalankan sistem pengawasan masyarakat alias Sismaswas.

"SISMASWAS berperan mengawasi dan mengendalikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Itu bertujuan agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan," ujar Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Perikanan DIY Veronica Vony Rorong saat kegiatan Pembinaan Teknis Pokmaswas di Kampung Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta pada Rabu (16/11). Vony menjelaskan, ancaman punahnya populasi ikan lokal di DIY karena sejumlah hal. Di antaranya, penangkapan ikan menggunakan strum, racun dan bahan kimia. Kemudian karena pencemaran limbah pabrik atau sampah rumah tangga. Juga karena ikan invasif. Pokmaswas beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan masyarakat petani ikan. Mereka berperan membantu mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan terhadap sumber daya alam kelautan dan perikanan merupakan tugas pengawas perikanan. Namun disadari personel pengawas perikanan jumlahnya terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat. Dasar pelibatan masyarakat itu tertuang dalam pasal 67 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka mengatakan, pengawasan menempati posisi strategis. Keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan. Dengan adanya kegiatan implementasi Sismaswas, Bayu berharap Pokmaswas menjadi mitra pemerintah. "Khususnya dalam membantu pemantauan kegiatan pemanfaatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di DIY," kata Bayu. Anggota Komisi B DPRD DIY Atmaji mengakui lahirnya Pokmaswas itu dilatarbelakangi ancaman punahnya jenis-jenis ikan lokal di DIY. Ikan-ikan lokal itu sebelumnya banyak dijumpai di sungai-sungai, beluk, embung maupun mata air lainnya. "Habitatnya di lokasi-lokasi yang bukan milik masyarakat. Artinya bukan jenis ikan yang dikembangkan di *blumbang* (kolam, Red) milik warga," terang Atmaji. Dia memberikan ilustrasi di masa lalu saat turun ke sungai dan merogoh gorong-gorong atau lubang sungai akan dijumpai banyak jenis ikan lokal. Misalnya lele, wader, cetul dan lainnya. "Sekarang kita rogoh ketemunya plastik dan sampah," tuturnya. Menyadari ancaman itu kemudian diluncurkan program restocking. Diadakan pelepasliaran kembali ikan-ikan lokal ke sumber-sumber air. Harapannya dengan pelepasliaran itu, ikan-ikan lokal tumbuh dan berkembang. Habitatnya dapat lestari. Untuk menjaga agar program restocking berjalan baik, dilibatkanlah masyarakat. "Wadahnya melalui Pokmaswas," katanya. (wla/kus/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005